



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Makassar 90221

Telepon: (0411) 854731, Faksimile: (0411) 871160

Laman: <http://sulsel.kemenkum.go.id>, Pos-el: tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com

Nomor : W.23.PP.05.02-346

28 April 2025

Sifat : segera

Lampiran : satu berkas

Hal : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum
Kota Makassar

Yth.

(Daftar Undangan terlampir)

di tempat

Memenuhi surat Plh Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor: 188.45/510 /B.Huk/IV/2025 tanggal 25 April 2025 hal pada pokok surat, bersama ini kami mengundang bapak/ibu untuk mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 30 April 2025

Waktu : 08.30 WITA - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kementerian
Hukum Jl.Sultan Alauddin Nomor 191 A
(samping Lapas Klas I Kota Makassar)

Materi :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Tahun 2025-2029;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Basmal

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah

Nomor : W.23.PP.05.02-346

Tanggal : 28 April 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Heny Widyawati, SH.MH. (Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum);
2. Kepala BAPPEDA Kota Makassar;
3. Kepala Bidang Hukum Setda Kota Makassar;
4. JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
5. JF Analisis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Basmal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

Makassar, 25 April 2025

Nomor : 188.45/Sl0 /B.Huk/ W /2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Harmonisasi
Ranperwali Kota Makassar.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sulawesi Selatan.
di
Makassar

Sehubungan dengan telah disusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Makassar tentang:

1. Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
2. Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
3. Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
4. Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Perda dan Perwali dimaksud guna mendapat harmonisasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Daerah Kota Makassar,

Melma Palamba

Tembusan:

1. Bapak Wali Kota Makassar;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Makassar 90221

Telepon: (0411) 854731, Faksimile: (0411) 871160

Laman: <http://sulsel.kemenkum.go.id>, Pos-el: tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com

DAFTAR HADIR

RAPAT PENGHARMONISASIAN PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN PRODUK HUKUM KOTA MAKASSAR

(Rabu, 30 April 2025)

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	A. Adhitya	KA Antarkota	[Signature]
2.	Asryani	DF Perancang	[Signature]
3.	Fahri H	Bayan	[Signature]
4.	Moh. Rosdixarto	AMKUM	[Signature]
5.	Shahid Samudra	F. Perencana Bappeda	[Signature]
6.	MUCH- ANDRY MANUHO	TIM AHLI	[Signature]
7.	Egbert Hacerano	F. Perencana I / Bappeda	[Signature]
8.	Ria Astuti Sampo	Perencana pertama / Bappeda	[Signature]
9.	Herianti	F. Perencana / Bappeda	[Signature]
10.	Lailatul Fitriyah	Statistisi / Bappeda	[Signature]
11.	Muhammad Nura	Tim ahli	[Signature]
12.	Elmira	F. Perencana / Bappeda	[Signature]
13.	Dian Septa Syam	Media / Bappeda	[Signature]
14.	Putri Rumpati B	Bappeda	[Signature]
15.	Nuryanti	Staf Bappeda	[Signature]
16.	Ragner. R	Staf Bappeda	[Signature]
17.	FARIDAH	Bappeda Lem Mkg	[Signature]
18.	Ikhwan Selawan	Bag. Hukum	[Signature]
19.	ARLIATI	Bag. HK	[Signature]
20.	Annisa Gayatri	Bag. Hukum	[Signature]

21.	M. tadj	kam1 sulsel	
22.	A. EKA ARIFANTO	BAPPEDA	
23.	IKHSAN AFRIZAL	JF ANKUM KANUKU	
24.	Jasman Lant	Bypa	
25.	Yulianto	Bappeda	

Makassar, 30 April 2025
Koordinator JFT Perancang,



A.M Abdillah



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 191A Gunung Sari, Makassar 90221

Telepon: (0411) 854731, Faksimile: (0411) 871160

Laman: <http://sulsel.kemenkum.go.id>, Pos-el: tudanumum.kemenkumsulsel@gmail.com

NOTULA RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH & RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
KOTA MAKASSAR

Hari : Rabu
Tanggal : 30 April 2025
Pukul : 09.00 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Harmonisasi

Peserta Rapat

- a. Hadir : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
2. Kepala Bagian Hukum Kota Makassar
3. Tim Ahli Kota Makassar
4. Staf Bagian Hukum Kota Makassar
5. Staf Bappeda Kota Makassar
6. JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan
7. JF Analisis Hukum
- b. Berhalangan Hadir : -

- Acara : 1. Pembukaan
2. Pembahasan
3. Kesimpulan
4. Penutup

Jalannya Rapat :

1. Pembukaan

Dengan mengucapkan Assalamualaikum Wr.Wb dan selamat pagi, rapat fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar dibuka oleh pimpinan rapat pada pukul 09.00 Wita. Menindaklanjuti surat Plh. Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor: 188.45/510/B.Huk/IV/2025 tanggal 25 April 2025, pada hari ini kita akan mengharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pemrakarsa pembentukan peraturan daerah dan peraturan wali kota ini yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar yang diwakili Kepala Bappeda Kota Makassar menyampaikan bahwa alasan pembentukan produk hukum daerah ini antara lain Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai pedoman arah kebijakan, indikator kinerja dan target kinerja, sebagai sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai yang dijabarkan melalui RKPD dan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan serta untuk menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah kota makassar.

2. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029:

- Pada konsiderans mengingat angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disarankan untuk dihapus karena tidak dianjurkan memasukkan Peraturan Perundang-Undangan yang belum ditetapkan
- Pada ketentuan umum disarankan untuk menghapus wakil walikota karena tidak disebutkan dalam batang tubuh
- Bab 2 arah pembangunan daerah disarankan untuk dihapus karena yang dimasukkan harusnya yang sesuai maksud, tujuan dan sistematika
- Sistematika batang tubuh raperda ini disarankan untuk menyesuaikan dengan lampiran
- Pasal 2 angka 1 untuk menentukan arah pembangunan daerah, pemerintah daerah menyusun RPJMD disarankan untuk dihapus
- Pasal 3 angka 1 dokumen RPJMD memuat disarankan untuk menghapus frasa bab dan menambahkan tabulasi a, b, c, d, dan e
- Disarankan untuk menghapus beberapa pasal yang disalin dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026:

- Disarankan untuk menpedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pasal 343
- Pasal 3 disarankan untuk menghapus bab diganti dengan tabulasi a, b, c, dst
- Pasal 4 ayat 3 disarankan untuk dihapus

Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025:

- Dasar hukum angka 9 disarankan untuk dihapus, peraturan perundang-undangan yang belum ditetapkan tidak perlu dimasukkan
- Secara teknik pembentukan rancangan peraturan wali kota ini sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029:

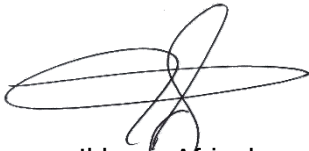
- Rancangan Peraturan Walikota ini disarankan untuk menpedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Konsiderans menimbang disarankan untuk diperbaiki, dipandang perlu menetapkan peraturan wali kota tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 dihapus
- Dasar hukum angka 9 disarankan untuk dihapus karena memasukkan peraturan perundang-undangan yang belum ditetapkan
- Pada pasal 3 disarankan untuk menghapus bab dan menambahkan tabulasi a, b, c, dst
- Beberapa pasal dalam raperwali ini yang disalin dari permendagri 86 tahun 2017 disarankan untuk dihapus

3. Kesimpulan

Berdasarkan tanggapan dan masukan dari peserta rapat, maka dapat disimpulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2025, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/sejajar, dan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notulis.



Ikhsan Afrizal

Makassar, 30 April 2025
Disahkan Oleh,
JFT Perancang Ahli Madya,



Asryani

DOKUMENTASI RAPAT HARMONISASI



